



PENETAPAN

Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

SUTRISNO bin HADI SOEWIGNYO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Jalan Kampung Jaya RT.13 RW.01, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS (TK Dharma Wanita Persatuan 2Jatiguwi), tempat tinggal di Jalan Kampung Jaya RT.13 RW.01, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 April 1978, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Kampung Jaya RT.013 RW. 001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Kampung Jaya

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013 RW. 001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 40 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. ELIA KHOLIS LUTHIA, umur 39 tahun;
 - b. FRIDA ANGGRAINI, umur 36 tahun;
 - c. MOCHAMMAD FARIS MAFRUDIN F, umur 34 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan nomor : 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tanggal 16 April 1978;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon II : ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon II : ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Pensiunan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sebenarnya adalah Nama Pemohon II : ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3507120207540001 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3507125802590001 tanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3507121510040029 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan tentang usulan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon II Nomor: 8526/104/C/89/SK tanggal 29 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata Nomor: 474.2/154/35.07.12.2006/2018 tanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata Nomor: B-126/Kua.13.35.13/PW.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga dan Surat Keputusan atas

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon Pemohon II tertulis nama Pemohon II: ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon II: ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohonkan untuk perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata Pemohon II adalah nama Pemohon II: ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sebenarnya adalah nama Pemohon II : ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat Akta Nikah Nomor 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018, sebagaimana alat bukti surat P.4;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah Nama Pemohon II: ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID;
3. Bahwa biodata Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon II: ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon I dan Pemohon II mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon II yang ada dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keputusan akan menjadikan Pemohon I dan Pemohon II tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan perubahan biodata yaitu nama Pemohon II: ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 diubah menjadi nama Pemohon II: ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata yaitu nama Pemohon II: ANIS FADILAH binti ACHSIN NURSAID yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/62/IV/1978 tanggal 16 April 1978 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/Kua.15.35.13/Pw.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi nama Pemohon II: ANIES FADLILAH binti ACHSIN NURSAID;

- Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;
- Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0540/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)